

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara/Daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional**, sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional**.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional SKPD dalam rangka pengungkapan yang memadai

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk

tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir.

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Penyusunan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir

a. Maksud :

Penyusunan Laporan Keuangan ini untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan Kecamatan Ranah Pesisir secara transparansi selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2018

b. Tujuan :

Penyusunan Laporan Keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik

1.2 Landasan Hukum Laporan penyusunan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Lapoaran Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCATATAN TARGET KINERJA**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Basis Akuntansi
- 4.3 Basis Pengukuran
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada OPD

BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Pendapatan
- 5.2 Belanja
 - 5.2.1 Belanja Operasional
 - 5.2.1.1 Belanja Pegawai
 - 5.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa
 - 5.2.2 Belanja Modal
- 5.3. Penjelasan Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Aset Lancar
 - 5.3.3 Aset Tetap

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII : PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCATATAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Sesuai dengan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.105.237.343 untuk Belanja Langsung Rp. 985.987.500 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.119.249.843 pada Kecamatan Ranah Pesisir sebesar Rp.3.723.107.574,00. Kebijakan Keuangan pada Kecamatan Ranah Pesisir tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 yang telah diubah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 mencakup Kebijakan Bidang Belanja baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Belanja Daerah pada Kecamatan Ranah Pesisir untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai (Gaji dan Penghasilan Lain) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kecamatan Ranah Pesisir.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung mencakup kebijakan bidang belanja yang berpihak kepada kepentingan publik, dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi
- b. Penyedia Jasa administrasi keuangan
- c. Penyedia Jasa Kebersihan
- d. Penyedia Alat tulis Kantor
- e. Penyedia Barang Cetak Pengadaan
- f. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- h. Penyedia Makan Minum
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

II. Program peningkatan sarana dan prasarana Apartaur

- a. Penyedia Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor
- b. Pemeliharaan/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Pengembangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- b. Penyusunan Perencanaan Anggaran
- IV. Program Pembangun wilayah kebangsaan**
 - a. Pelaksanaan Upacara HUT RI
- V. Program Pendidikan Masyarakat**
 - a. Fasilitas Penyelenggaraan Pilwana
- VI. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
 - a. Persiapan dan penyelenggaraan MTQ
- VII. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif**
 - a. Partisipasi pada Event Ekonomi kreatif berbasis seni dan Budaya Daerah
- VIII. Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolah Keuangan Desa/Nagari**
 - a. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintah Nagari
 - b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari
- IX. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan**
 - a. Pembinaan PKK Kecamatan
 - b. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
 - c. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
 - d. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan
 - e. Fasilitas masalah Trantib dan pertahanan
 - f. Fasilitas Kegiatan kepemudaan keagamaan dan Kemasyarakatan
 - g. Pelayanan Administrasi Terpadu
- X. Program Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan**
 - a. Fasilitas Promosi Produk Unggulan Kecamatan dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan program pembangunan Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Tahun 2016 – 2018 yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018

- Visi : Terwujudnya sumber daya aparatur Kecamatan yang profesional dalam pelayanan menuju masyarakat yang religius, aman dan sejahtera
- Misi : Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai, agama dan budaya.

Tabel I

Sasaran Strategis		Satuan	Target
Uraian	Indikator Kinerja		
1	2	3	4
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	1. Nilai LAKIP Kecamatan Ranah Pesisir 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	%	85%
Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	1. Meningkatkan peran serta pemerintah kecamatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	%	85%

	2. Peringkat MTQ Tingkat Kabupaten		
	3. Pembinaan kelembagaan KAN		

Dari Target Kinerja Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, didukung dengan Program dan Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2018 yang target dan realisasinya sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	100
		b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	12 bln	100
		c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bln	12 bln	100
		d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bln	12 bln	100
		e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bln	12 bln	100
		f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln	12 bln	100
		g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bln	12 bln	100
		h. Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bln	12 bln	100
		i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bln	12 bln	100
		j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bln	12 bln	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor	12 bln	12 bln	100
		b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bln	12 bln	100
		c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bln	12 bln	100
		d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	12 bln	12 bln	100
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3 Laporan	3 Laporan	100
		b. Penyusunan Perencanaan Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100
4	Program pengembangan wawasan kebangsaan	a. Pelaksanaan Upacara HUT RI	12 bln	12 bln	100
5	Program pendidikan politik masyarakat	a. Fasilitasi Penyelenggaraan Pilwara	9 Nagari	9 Nagari	100
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	a. Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ	12 bln	12 bln	100
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	a. Partisipasi Pada Event Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Daerah	12 bln	12 bln	100
8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	a. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari	10 Nagari	10 Nagari	100
		b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	10 Nagari	10 Nagari	100
9	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan	a. Pembinaan PKK Kecamatan	12 bln	12 bln	100
		b. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	12 bln	12 bln	100

		c. Perencanaan Pembangunan Kecamatan	12 bln	12 bln	100
		d. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	12 bln	12 bln	100
		e. Fasilitasi masalah Trantib dan pertanahan	12 bln	12 bln	100
		f. Fasilitasi kegiatan Kepemudaan, keagamaan dan Kemasyarakatan	12 bln	12 bln	100
		g. Pelayanan Administrasi Terpadu (TAPEN)	12 bln	12 bln	100
10	Program Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan	a. Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Kecamatan dan Ekonomi Kreatif	12 bln	12 bln	100

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 18.000.000	Rp. 14.361.306	79.79
		b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 38.900.000	Rp. 38.900.000	100
		c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 15.800.100	Rp. 15.800.100	100
		d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 19.203.000	Rp. 19.202.996	100
		e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 11.906.600	Rp. 11.904.542,	99.98
		f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.553.000	Rp. 1.553.000	100
		g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.200.000	Rp. 3.200.000	100
		h. Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 17.695.000	RP. 17.694.500	100
		i. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp. 32.400.000	Rp. 32.310.500	99.72
		j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp.47.450.000	Rp. 47.440.000	99.98
Jumlah Progrm Administrasi Perkantoran			Rp. 206.107.700	Rp.202.366.944	98.19
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.700.000	Rp. 4.700.000	100
		b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 5.125.000	Rp. 5.125.000	100
		c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 46.415.289	Rp.45.477.528	97.98
		d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp. 374.000.000	Rp. 370.650.000	99.10
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Rp.430.240.289	Rp. 425.952.528	99.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Rp. 2.450.000	Rp. 2.440.000	99.95
		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	100
Jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Rp 5.450.000	Rp. 5.440.000	99.82
4	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan Upacara HUT RI	Rp. 88.480.000	Rp. 88.479.750	99.99
Jumlah Program pengembangan wawasan kebangsaan			Rp. 88.480.000	Rp. 88.479.75	99.99

5	Program pendidikan politik masyarakat	Fasilitasi Penyelenggaraan Pilwana	Rp. 6.775.000	Rp. 6.775.000	100
Jumlah Program pendidikan politik masyarakat			Rp. 6.775.000	Rp. 6.775.000	100
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ	Rp. 48.575.000	Rp. 48.575.000	100
Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Rp. 48.575.000	Rp. 48.570.000	
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Partisipasi Pada Event Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Daerah	Rp. 13.800.000	Rp. 13.795.000	99.96
Jumlah Program Pengembangan Ekonomi Kreatif			Rp.13.800.000	Rp. 13.795.000	99.96
8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Rp. 14.585.000	Rp. 14.582.500	100
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	Rp. 8.155.000	Rp. 8.150.000	99.94
Jumlah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari			RP. 22.740.000	Rp. 22.732.500	99.98
9	Program Pembangunan Wilayah Kecamatan	Pembinaan PKK Kecamatan	Rp. 68.040.750	Rp. 67.999.977	99.94
		Pembinaan Bulan BhaktiGotong Royong	Rp. 9.326.602	Rp. 9.326.602	100
		Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Rp. 2.961.460	Rp. 22.913.960	99.79
		Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	Rp. 6.247.199	Rp. 6.242.900	99.93
		Fasilitasi masalah Trantib dan pertanahan	Rp. 20.935.000	Rp. 20.925.000	99.95
		Fasilitasi kegiatan Kepemudaan, keagamaan dan Kemasyarakatan	Rp. 18.462.500	Rp. 18.462.500	100
		Pelayanan AdministrasiTerpadu (TAPEN	Rp. 17.846.000	Rp. 17.845.500	100
Jumlah Program Pembangunan Wilayah Kecamatan			Rp. 163.819.511	Rp. 163.716.337	
10	Program Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan	Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Kecamatan dan Ekonomi Kreatif	0	0	0

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 98,19%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencapaian Target Kinerja **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 79.79% dikarenakan tidak stabilnya biaya tarif listrik.

2. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Jasa adminisrasi keuangan** dapat dilaksanakan 100 % dan untuk capaian Target Kinerja Keuangan 100 % hal ini disebabkan tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran.
3. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Jasa Kebersihan** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % hal ini disebabkan tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran.
4. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Alat tulis Kantor** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % hal ini disebabkan tidak ada masalah dalam penyerapan anggaran dan Alat tulis kantor cukup untuk kebutuhan 2018.
5. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Barang Cetak Pengadaan** dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,98%, hal ini disebabkan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
6. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
7. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
8. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Makan Minum** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018
9. Pencapaian Target Kinerja **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerahnyedia** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.72 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018
10. Pencapaian Target Kinerja **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.98 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Dalam pencapaian Target Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99,00%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencapaian Target Kinerja **Penyedia Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.99 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018
2. Pencapaian Target Kinerja **Pemeliharaan/Berkala Gedung Kantor** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
3. Pencapaian Target Kinerja **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional** dapat dilaksanakan 100 %, yang digunakan untuk 2 (dua) kendaraan dinas 1 (satu) kendaraan Roda Empat dan 1 (satu) kendaraan roda 2 dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 97.98 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
4. Pencapaian Target Kinerja **Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.82 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.

c. Program Peningkatan Pengembangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Pencapaian Target Kinerja **Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.59 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
2. Pencapaian Target Kinerja **Penyusunan Perencanaan Anggaran** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 %, pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.

d. Program Pembangun Wilayah Kebangsaan

1. Pencapaian Target Kinerja **Pelaksanaan Upacara HUT RI** dapat dilaksanakan 100 %, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.

e. Program Pendidikan Masyarakat

1. Pencapaian Target Kinerja **Fasilitas Penyelenggaraan Pilwana** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 %

pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.

f. Pogram Pemberdayaan Kelebagaan Kesejahteraan Sosial

1. Pencapaian Target Kinerja **Penyelenggaraan Pilwa Persiapan dan penyelenggaraan MTQ** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.99 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018

g. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

1. Pencapaian Target Kinerja **Pertisipasi pada Event Ekonomi kreatif berbasis seni dan Budaya Dearah** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.96 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.

h. Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolah Keuangan Desa/Nagari

1. Pencapaian Target Kinerja **Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintah Nagari** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.98 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
2. Pencapaian Target Kinerja **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.94 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.

i. Prog. Pembangunan Wilayah Kecamatan

1. Pencapaian Target Kinerja **Pembinaan PKK Kecamatan** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.94 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
2. Pencapaian Target Kinerja **Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
3. Pencapaian Target Kinerja **Perencanaan Pembangunan Kecamatan** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.79 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
4. Pencapaian Target Kinerja **Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan

99.93 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.

5. Pencapaian Target Kinerja **Fasilitas masalah Trantib dan pertahanan** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 99.95 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
6. Pencapaian Target Kinerja **asilitas Kegiatan kepemudaan keagamaan dan Kemasyarakatan** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.
7. Pencapaian Target Kinerja **Pelayanan Administrasi Terpadu** dapat dilaksanakan 100%, dan untuk Pencapaian Target Kinerja Keuangan 100 % pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini adalah Kecamatan Ranah Pesisir

4.2. Basis Akuntansi

Kecamatan Ranah Pesisir menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 menggunakan basis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Kecamatan Ranah Pesisir menyusun Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana telah diubah kedua kalinya dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kecamatan Ranah Pesisir sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 yang digunakan sebagai dasar di dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2018

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2018. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2018 menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya yang mengikuti sampai dengan aset tersebut dimanfaatkan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2018 menggunakan uang Rupiah. Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2018 menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada Kecamatan Ranah Pesisir Pada Laporan Keuangan Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2018 penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada adalah sebagai berikut:

- Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pada Kecamatan Ranah Pesisir dimana dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disebut belanja sedangkan dalam Laporan Operasional (LO) disebut beban;
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kecamatan Ranah Pesisir sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Inspektorat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari :
 - ❖ Aset Lancar
 - ❖ Dana Cadangan
 - ❖ Investasi Jangka Panjang
 - ❖ Aset Tetap
 - ❖ Aset Lainnya
- Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Inspektorat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir, terdiri dari:
 - ❖ Kewajiban Jangka pendek
 - ❖ Kewajiban jangka panjang
- Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Ranah Pesisir yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Ranah Pesisir pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2015 dan 2018 Kecamatan Ranah Pesisir tidak ada atau tidak mempunyai pendapatan.

5.2. Belanja

Rincian Belanja menurut Jenis Belanja adalah sebagai berikut : (LRA)

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasional	Rp. 2.731.237.343	Rp. 2.697.680.360	98,77
2	Belanja Modal	Rp. 374.000.000	Rp. 370.650.000	99,10
	Jumlah	Rp. 3.105.237.343	Rp. 3.068.330.360	98.81

5.2.1. Belanja Operasional

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Kecamatan Ranah Pesisir yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.119.249.843	Rp. 2.090.502.301	98,64
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 611.987.500	Rp. 607.178.059	99,21
	Jumlah	Rp. 2.731.237.343	Rp. 2.697.680.360	

5.2.1.1. Belanja Pegawai

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja gaji dan Tunjangan	Rp. 1.555.549.843	Rp. 1.537.697.301	98,85
2	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Rp. 563.700.000	Rp. 552.805.000	98,07
	Jumlah	Rp. 2.119.249.843	Rp. 2.090.502.301	

Realisasi untuk Tahun Anggaran 2018 total untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. Rp. 2.090.502.301 dari anggaran sebesar Rp. 2.119.249.843 atau sebesar 98,64%, yang terdiri dari :

- Belanja Gaji Pokok PNS

Dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Penghasilan lain bagi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ranah Pesisir Tahun anggaran 2018, direalisasikan sebesar Rp. 1.537.697.301 dari anggaran sebesar Rp. 1.555.549.843 atau sebesar 98,85%.

- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

Dipergunakan untuk pembayaran Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Ranah Pesisir Tahun anggaran 2018, direalisasikan sebesar Rp. 552.805.000 dari anggaran sebesar Rp. 563.700.000 atau sebesar 98,07%.

5.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 35.116.810	Rp. 35.089.806	99,92
2	Belanja Jasa Kantor	Rp. 66.328.000	Rp. 62.681.306	94,50
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 40.033.090	Rp. 39.088.928	97,64
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 20.642.850,	Rp. 20.642.042	100,00
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	100,00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	100,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 91.950.000	Rp. 91.878.727,	99,92
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp. 10.795.000	Rp. 10.795.000	100,00
9	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Rp. 50.862.500	Rp. 50.862.500	100,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 133.210.000	Rp. 133.090.500	99,91
11	Belanja Pemeliharaan	Rp. 8.625.000	Rp. 8.625.000	100,00
12	Belanja Honorarium Non Pegawai	Rp. 79.340.000	Rp. 79.340.000	100,00
13	Honorarium PNS	Rp. 35.300.000	Rp. 35.300.000	100,00
14	Honorarium Non PNS	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	100,00
15	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp. 26.560.000	Rp. 26.560.000	100,00
16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 374.000.000	Rp. 370.650.000	99,10
	Jumlah	Rp. 979.063.250	Rp. 944.343.809	96,00

Tahun 2018 terdiri dari 10 (Sepuluh) Program dan 30 (tiga puluh) Kegiatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 sebesar Rp. 944.343.809 dari anggaran sebesar Rp. 979.063.250 atau sebesar 96,00%.

5.2.2. Belanja Modal

No	Uraian	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 374.000.000	Rp. 370.650.000	99,10
	Jumlah	Rp. 374.000.000	Rp. 370.650.000	99,10

Belanja Modal Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2018 sebesar Rp. 370.650.000 dari anggaran sebesar Rp. 374.000.000 atau 99,10%.

Belanja Modal Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2018 berupa Belanja rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

5.3. Penjelasan Pos Neraca

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kecamatan Ranah Pesisir sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Kecamatan Ranah Pesisir, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

No	Uraian	Per 30 Desember 2018 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 30 Desember 2017 (Rp)
1	Tanah	Rp. 211.039.850	Rp. 30.000.000	-	Rp. 181.039.850
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 527.696.129	-	-	Rp. 527.696.129
3	Gedung dan bangunan	Rp. 919.034.000	Rp. 370.650.000	Rp. 30.000.000	Rp. 578.384.000
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	Rp. 13.000.000	-	-	Rp. 13.000.000
5	Aset tetap lainnya	Rp. 629.166.67	-	-	Rp. 629.166.67
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0	-	-	Rp. 0
7	Akumulasi dalam penyusutan			(Rp. 468.087.880,94)	Rp. 468.087.880,94
	Jumlah	Rp. 1.671.399.145,67	Rp. 400.650.000	Rp. 498.087.880,94	Rp. 832.661.264,73

5.3.2. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas atau setara kas. Aset Lancar Kecamatan Ranah Pesisir terdiri dari:

No	Uraian	Per 30 Desember 2018	Per 30 Desember 2017
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan		
3	Piutang Pajak	-	-
4	Barang Persediaan	Rp.2.812,00	
5	Piutang Retribusi	-	-
6	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-
7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	-	-
8	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
9	Piutang kepada Pihak Ketiga	-	-
10	Piutang Lainnya	-	-

Dari tabel di atas pada Kecamatan Ranah Pesisir tidak saldo dari aset lancar baik itu pada akhir tahun 2017 maupun pada akhir tahun 2018 karena penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2018.

5.3.2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir untuk dimanfaatkan oleh kepentingan Umum, saldo aset tetap pe 30 desember 2018 sebesar Rp. 1.203.311.264,73,- terdiri dari :

✚ Tanah	: Rp. 211.039.850
✚ Peralatan dan mesin	: Rp. 527.696.129
✚ Gedung dan bangunan	: Rp. 919.034.000
✚ Jalan, irigasi dan jaringan	: Rp. 13.000.000
✚ Aset tetap lainnya	: Rp. 629.166
✚ Kontruksi dalam pengerjaan	: Rp. —
✚ Akumulasi penyusutan	: Rp.
	Rp. 1.671.399.145,67

Perbandingan antara Aset Tetap Kecamatan Ranah Pesisir pada akhir Tahun Anggaran 2018 dan 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Per 30 Desember 2018 (Rp)	Per 30 Desember 2017 (Rp)
1	Tanah	Rp. 211.039.850	Rp. 181.039.850
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 527.696.129	Rp. 527.696.129
3	Gedung dan bangunan	Rp. 919.034.000	Rp. 578.384.000
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000
5	Aset tetap lainnya	Rp. 629.166.67	Rp. 629.166.67
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Rp. 0	Rp. 0
7	Akumulasi dalam penyusutan	Rp. 0	Rp. 468.087.880.94
Jumlah		Rp. 1.671.399.145,67	Rp. 832.661.264,73

Secara rinci Aset Tetap dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tanah

Pada Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Ranah Pesisir tidak ada Belanja Tanah, hanya belanja tanah untuk timbunan halaman kantor camat Ranah Pesisir sebesar Rp. 30.000.000,-

2. Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2018 (Rp.)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor a. Kendaraan Bermotor Penumpang b. Kendaraan Bermotor Beroda Dua c. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp. 232.061.628 Rp. 176.722.412 Rp. 18.745.261 Rp. 36.593.955
2	Alat Kantor a. Mesin Tik b. Alat Kantor Lainnya	Rp. 60.915.549 Rp. 5.000.000 Rp. 55.915.549
3	Alat Rumah Tangga a. Meubelair b. Alat Pendingin c. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp. 114.872.001 Rp. 66.322.000 Rp. 12.000.000 Rp. 36.550.001
4	Komputer a. Personal Komputer b. Peralatan Komputer Mainframe c. Peralatan Mini Komputer d. Peralatan Personal Komputer	Rp. 75.301.951 Rp. 55.804.451 Rp. 500.000 Rp. 9.790.000 Rp. 9.207.500
5	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat a. Kursi Kerja Pejabat b. Lemari dan Arsip Pejabat	Rp. 24.045.000 Rp. 10.500.000 Rp. 13.545.000
6	Alat Studio a. Peralatan Studio Visual	Rp. 20.500.000 Rp. 20.500.000
Jumlah Peralatan dan Mesin		Rp. 527.696.129

3. Jalan, irigasi, dan jaringan

Pada Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Ranah Pesisir tidak ada Belanja Jalan, irigasi, dan jaringan.

4. Gedung dan Bangunan

Pada Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Ranah Pesisir Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 919.034.000 terdiri dari belanja rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

5. Aset Tetap Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Ranah Pesisir Aset Tetap untuk Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 629.166.67

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Pada Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Ranah Pesisir tidak ada Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga Aset Tetap untuk Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp.- (Nol Rupiah)

7. Akumulasi Penyusutan

Pada Kecamatan Ranah Pesisir perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus, sehingga untuk akumulasi penyusutan akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2018	2017
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 315.395.200,94,	Rp. 315.395.200,94
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	Rp. 151.067.680,	Rp. 151.067.680,
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp. 1.625.000,	Rp. 1.625.000,
Jumlah		Rp. 468.087.880,94	Rp. 468.087.880,94

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

OPD Kecamatan Ranah pesisir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010. Susunan organisasi terdiri dari Camat yang saat ini di jabat oleh Zul Arzil, S.Sos, Sekretaris Kecamatan, beberapa Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Sub Bagian serta Staf. Sebagai tindak lanjut dari Perda tersebut diatas, dalam rangka menentukan Tupoksinya telah diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2010.

Dilihat dari jumlah pegawai, saat ini pegawai yang berstatus PNS berjumlah 20 orang terdiri dari :

- Golongan IV.b : 1 Orang
- Golongan IV.a : 2 orang
- Golongan III.d : 5 orang
- Golongan III.c : 4 orang
- Golongan III.b : 6 orang
- Golongan III.a : 3 orang
- Golongan II.c : 3 orang
- Golongan II.b : 2 orang
- Golongan II.a : 1 orang

A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi OPD Kecamatan Ranah Pesisir saat ini terdiri dari 1 (satu) Eselon III. A, 1 (satu) Eselon III.B, 3 (Tiga) Eselon IV.A dan 2 (Dua) Eselon IV.B Sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 2008 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kepala Kecamatan (Camat)
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman Ketertiban
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan

BAB VII

PENUTUP

Kinerja OPD Kecamatan Ranah Pesisir secara Struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) telah mencapai keberhasilan namun belum optimal, disamping itu tentu ada kekurangan yang disebabkan berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas.

Kantor Camat Ranah Pesisir telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai dukungan dari semua pihak untuk mencapai sasaran program dengan memanfaatkan kekuatan yang ada guna menghadapi kendala untuk mencapai tujuan dan sasaran terutama pada pengelolaan keuangan.

Dengan telah melakukan penelitian pada pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban belanja dana Kecamatan Ranah Pesisir selama TA. 2018, maka dibuat Laporan Keuangan OPD Tahun Anggaran 2018.

Apabila dibandingkan dengan Laporan Keuangan tahun sebelumnya mengalami perubahan, maka terhadap Laporan Keuangan Tahun 2018 diberikan penjelasan yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, tersebut di atas.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini dibuat sampai dengan Akhir Tahun 2018 dari Inspektorat Daerah Kecamatan Ranah Pesisir, disampaikan untuk menjadikan maklum adanya

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun sebagai bagian dari kewajiban setiap OPD sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran.

CAMAT RANAH PESIR



ZUL ARZIL, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19650101 19860 2 004